

**BUDAYA POLITIK MASYARAKAT KEJAWEN TERHADAP NILAI
DEMOKRASI: STUDI KASUS PAGUYUBAN RESIK KUBUR JERO
TENGAH CILACAP**

Joi Karlina, Yuwanto

Joikarlina99@gmail.com , Yuwantosaja@yahoo.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Haji Soedarto, SH Tembalang Kotak Pos 1269

Telepon (024)7465407 Faksimile (024)7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAKS

Masyarakat Kejawen memiliki kepala paguyuban yang dijadikan seorang pemimpin oleh mereka dengan sistem pemilihan turun-temurun menjadikan penelitian terhadap hubungan dengan Nilai Demokrasi menjadi kajian yang menarik. Penelitian ini mengkaji Budaya Politik Masyarakat Kejawen terhadap Nilai Demokrasi: Studi Kasus Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah Cilacap.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif ekplanatif sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori budaya politik dan nilai demokrasi untuk menganalisis hasil penelitian di Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah.

Hasil penelitian menemukan bahwa, Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah bisa dikategorikan masih memegang kuat budaya politik Parokial. Di sisi lain, budaya politik Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah mendukung terhadap nilai demokrasi. Saran dari peneliti adalah kajian ulang terkait definisi budaya politik Parokial.

Kata Kunci : Budaya Politik, Nilai Demokrasi dan Paguyuban

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum demokrasi dipahami sebagai “dari, oleh dan untuk rakyat”, artinya proses-proses politik diarahkan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi merupakan sebuah alur dari sistem pemerintahan sebuah negara yang digunakan untuk wujud kedaulatan rakyat terhadap negaranya sendiri agar dijalankan oleh pemerintah (Suparyanto, 2018: 1). Dengan demikian, demokrasi adalah hal yang vital yang harus dimengerti seluruh rakyat. Salah satu bentuk yang nyata adalah Pemilihan Umum (pemilu) atau sering disebut pesta demokrasi. Pemilu diikuti oleh seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat yang ada, yang mana mereka mempunyai kewajiban untuk memberikan hak suaranya pada saat pemilu.

Namun dalam berjalannya pemilu ini tentunya akan ada perbedaan—perbedaan pendapat yang mana

menambah suasana panas yang terjadi di dunia perpolitikan ini, ada masyarakat yang melihat dari segi kebijaksanaan atau dari keramahan dan masih banyak lagi yang ditunjukkan dari masing-masing calon pemimpin ini. Masyarakat sekarang adalah masyarakat yang lebih bijak dan mengerti dalam pelaksanaan dari berjalannya pemerintahan namun juga beberapa masih ada yang kurang mengetahui. Masih ada masyarakat yang terlalu cuek terhadap apa yang sedang terjadi dikarenakan masih rendahnya nilai-nilai demokrasi dan belum paham. “Nilai Demokrasi adalah jika kita tidak ingin dihina maka jangan menghina orang lain, menggunakan kemampuan diri kita sendiri agar tidak bergantung kepada orang lain, menjauhi peraturan yang sudah ada, adanya perbedaan pendapat menjadi hal yang harus terus dikaji dan saling menghargai.” (Zuriah, 2014: 45)

Kebanyakan masyarakat yang cuek terhadap keberlangsungan negara

adalah masyarakat yang mempunyai kelompok atau suku. Mereka yang bergerombol atau berkelompok ini jelas akan mengikuti semua arahan kepala dari kelompok ini. Kelompok masyarakat ini adalah contoh bentuk dari Budaya Politik. Akibat kehidupan yang berubah dan terus maju, adanya kewenangan baru dan kekuasaan yang silih berganti, tokoh-tokoh pemimpin yang di daur ulang dan dari waktu yang lalu menjadi kini semua menjadi sebab budaya politik dari masyarakat berubah dan terus mengalami perubahan (Saleh dan Munif, 2015: 312-313).

Berdasarkan penelitian terdahulu Safrida (2017) menyatakan bahwa “Kejawen yang merupakan sebuah produk yang berasal dari berbagai agama, sudah menjadi tradisi dan melekat dalam sebuah kepercayaan baru, khususnya bagi masyarakat Jawa atau masyarakat luar Jawa yang hidup disekitar pulau jawa.” Sedangkan menurut Rumawati (2011) Kejawen

merupakan wujud dari kebudayaan jawa yang hingga saat sekarang masih menjaga keberlangsungan nya.

Kabupaten Cilacap terletak di Jawa Tengah bagian barat dan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Barat dan satu-satunya kabupaten di wilayah Jawa Tengah yang menggunakan awalan Ci, yang mana identik dengan daerah di Jawa Barat. Sebagai daerah yang masyarakatnya tercampur dengan budaya sunda. Di beberapa wilayahnya masih banyak masyarakat yang menganut kepercayaan Kejawen. Masyarakat Kejawen ini menganut kepercayaan yang mana disebut kejawen atau kejawa-jawaan. Masyarakat ini hidup dengan bergerombol bersama penganut lainnya, masyarakat ini memiliki rumah yang sudah dari zaman dahulu menjadi tempat untuk penganut Kejawen ini melakukan pertemuan yang disebut dengan Rumah Pasemuan. Kejawen adalah perpaduan agama lain, telah menjadi sebuah tradisi

serta menyatu menjadi sebuah kepercayaan baru bagi masyarakat Jawa atau masyarakat hidup di sekitar pulau Jawa (Safrida, 2017: 2).

Masyarakat kejawen di wilayah Cilacap dibagi menjadi beberapa Paguyuban yang masing-masing nya mempunyai Bedogol dan mereka saling mempunyai hubungan kekerabatan antar paguyuban. Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah adalah paguyuban masyarakat Kejawen di Cilacap yang memiliki anggota sebanyak 2.500 pengikut. Paguyuban merupakan ketika kita hidup bersama dengan hubungan yang kita miliki, dimana hubungan ini kekal dan secara alamiah murni terbentuk dengan sendirinya (Ferdinand Tonnies pada Soerjono Soekanto, 2009: 116) . Paguyuban ini masih menjalankan tradisi yang sudah ada dari zaman leluhur dan masih terus mereka lestarikan di tengah kehidupan globalisasi yang makin berkembang.

Paguyuban seringkali berlawanan arah dengan pemerintah yang berjalan meski ada juga yang mengikuti pemerintah yang berjalan. Banyak paguyuban yang terkesan tidak peduli dengan keberlangsungan bangsa ini, lalu bagaimana dengan paguyuban Resik Kubur Jero Tengah?

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis menarik sebuah pertanyaan penelitian tentang, “Bagaimana Budaya Politik Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah memengaruhi nilai demokrasi?”.

C. Tujuan Penelitian

Didasari rumusan masalah yang ada di atas maka tujuan dari penelitian ini merupakan agar masyarakat tau apakah budaya politik dari paguyuban Resik Kubur Jero Tengah memengaruhi nilai demokrasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberi dua manfaat yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Pertama ada manfaat akademis yaitu sebagai penambah wawasan bagi pembaca tentang budaya politik Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah. Kedua, manfaat praktis terbagi menjadi dua yaitu memberi informasi bagi peneliti lain terkait adanya budaya politik dalam Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah dan penulis berharap dapat memberi manfaat agar memperluas dan menambah wawasan dalam bidang politik bagi penulis atau pun pembaca.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa kerangka teori untuk membantu menjawab rumusan masalah, diantaranya:

1. Budaya Politik

Kemunculan kata budaya politik yang merupakan sebuah wacana politik ada pada akhir perang dunia II, yakni

timbul akibat politik AS (Gaffar, 2004: 97). “Budaya Politik ialah penilaian, pengetahuan, keyakinan, perasaan dan emosional warga negara terhadap sistem politik yang ada di negaranya, dimana semua sikap itu adalah hal yang identik.” (Almond dan Verba, 1965: 2). Budaya politik dapat berubah dari masa ke masa, mengikuti perkembangan zamannya. Namun masih ada juga budaya politik yang berhenti atau masih mengikuti dari zaman terdahulu. Perkembangan Budaya Politik sekarang adalah wujud dari budaya politik feodal yang berakar dari budaya politik kerajaan yang sentralistik, patrimonialistik dan mistik yang terus berkembang. Esensinya masih belum berubah meski pun aksesori di luarnya mengalami perubahan, baik nama, atribut, institusi atau lembaga yang ada.

Sebagaimana disampaikan oleh Saleh dan Munif (2015: 312) bahwa, “Budaya Politik terdiri dari dua kata budaya dan politik, budaya dalam

bahasa sansekerta yaitu budhayah bentuk jamak dari budhi yang berarti akal atau budi, dan politik yaitu kegiatan yang membuat, mempertahankan dan juga mengamandemenkan peraturan.”. Budaya politik feodal itu telah menempatkan seorang penguasa menjadi menjauh dari realitas rakyatnya sendiri yang telah memilihnya. Pemilu yang menjadi sebuah jamuan hebat hanya terasa sangat hebat pada acara itu saja dan semua hal yang dikatakan dan ingin dilakukan tidak selaras dengan kepentingan rakyat bahkan tidak ada yang terjadi dikemudian hari yang diharapkan rakyat (Riyanto, 2006: 6). Akibat kehidupan masyarakat yang berubah dan terus maju, adanya kewenangan baru dan kekuasaan yang silih berganti, tokoh-tokoh pemimpin yang di daur ulang dan dari waktu yang lalu menjadi kini semua menjadi sebab budaya politik dari masyarakat berubah dan terus mengalami perubahan (Saleh dan Munif, 2015: 313).

Ada beberapa pengelompokan budaya politik menurut banyak ahli:

a. Budaya Politik Parokial

Budaya Politik ini hanya melingkupi budaya kecil dalam wilayah sempit. Budaya politik Parokial menurut beberapa ahli tingkat partisipasi politik masih sangat rendah, warga dengan budaya parokial masih ter kungkung dalam tata nilai yang berlaku secara tradisional dibanding keterkaitan pada institusi politik modern.. Pemimpin adat atau kepala suku umumnya merangkap pada keseluruhan aspek kepemimpinan, mulai dari pemimpin politik sekaligus menjadi pemimpin religius (agama), pemimpin sosial, hingga pemimpin dalam persoalan menyangkut ekonomi. Budaya Politik Parokial yakni tingkat partisipasi masih rendah atau masih kuno yang disebabkan pengetahuan atau pemahaman serta keyakinan dan kepercayaan (Almond dan Verba, 1965 : 3)

b. Budaya Politik Subjek

Budaya politik ini sudah mulai mempunyai kesadaran dan minat kepada dunia politik. Selanjutnya, budaya politik subjek tidak memberikan dampak apa pun terhadap perubahan politik. Budaya Politik subjek adalah posisi yang tidak terlihat dan posisi ini tidak akan menentukan apa pun dari perubahan politik (Almond dan Verba, 1965 : 3).

c. Budaya Politik Partisipan

Budaya Politik ini menunjukkan semua anggotanya sudah berperan aktif dalam sistem politik mereka mengerti bahwa mereka adalah pemegang keberhasilan dari pemerintahan. Hak-hak politik dalam budaya politik ini sudah dipenuhi dan disadari oleh masyarakat, yang mana berarti masyarakat melakukan semua yang menjadi haknya untuk mendapatkan kewajibannya.

Sementara itu, menurut Almond (2005: 3) berpendapat bahwa budaya politik diperhatikan menurut sikapnya ada 3 bentuk, yang pertama Budaya politik parokial masyarakat masih tidak peduli terhadap sistem politik atau disebut budaya politik kuno. Budaya Politik ini masih ada banyak dari semua kalangan. Yang kedua, Budaya politik kaula, pada bagian ini banyak masyarakat yang hanya meminta haknya tetapi tidak memberikan kewajiban mereka terhadap sistem politik. Struktur ini ada pada bagian masyarakat berkembang. Terakhir, Budaya politik partisipan pada struktur ini masyarakat sudah sangat maju mereka sudah mengerti apa yang perlu mereka lakukan dan apa yang perlu mereka dapatkan.

Budaya Politik adalah pengaruh yang diberikan oleh perubahan zaman dan juga tingkat pendidikan masyarakatnya terhadap sistem politik yang berjalan menjadikan sebuah nilai

yang terbentuk (Saleh dan Munif, 2015: 312). “Budaya Politik adalah penerapan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik.” (Almond dan Verba, 2015: 3). Sementara itu, menurut Kantraprawira (2016: 8) berpendapat budaya Politik ialah susunan sikap dan perilaku manusia terhadap sistem politik yang berkembang dan membentuk sebuah nilai. Budaya Politik adalah sebuah sikap terhadap pelaku politik dan susunan wawasan tentang politik dan pemerintahan (Rohaniyah dan Efriza, 2017). Dalam penjelasan-penjelasan yang ada kita ketahui bahwa budaya politik dari perkembangan zamannya akan terus mengalami perubahan.

Orientasi seseorang terhadap sistem politik terdiri dari 3 komponen, yaitu orientasi kognitif, afektif dan evaluasi:

A. Komponen Orientasi Kognitif

Komponen orientasi kognitif adalah orientasi terhadap sistem politik yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan kepercayaan. Pengetahuan dan kepercayaan yang dimiliki seseorang akan memengaruhi sikap terhadap sistem politik, tokoh pemerintah, kebijaksanaan yang diambil atau simbol-simbol yang dimiliki pada sistem politik.

B. Komponen Orientasi Afektif

Merupakan orientasi akibat adanya aspek perasaan atau ikatan emosional terhadap sistem politik. Orientasi perasaan secara khusus dapat menentukan sikap atau penilaian terhadap sistem politik tertentu.

C. Komponen Orientasi Evaluasi

Yaitu orientasi yang dilandasi dengan suatu penilaian dan kriteria terhadap sistem politik. orientasi evaluasi dapat memengaruhi keputusan atau sikap yang akan diambil seseorang terhadap sistem politik tertentu.

2. Masyarakat Kejawen

Dalam teori sosiologis masyarakat dibagi menjadi 2, yaitu masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Masyarakat ialah sekumpulan orang yang bergaul atau dengan ilmiahnya saling interaksi (Koentjaraningrat, 2009). Pada masyarakat tradisional ada nilai-nilai tradisi yang turun-menurun dipertahankan dan dijalankan. “Tradisi adalah adat istiadat, yang mana berisi kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.” (Arriyono dan Siregar, 1985: 4). Dalam istilah sosiologi, dipahami bahwa adat, tradisi dan kepercayaan selalu terjaga karena diwariskan secara turun temurun. (Soekanto, 1983: 459).

Tradisi mirip dengan benda-benda material dan ide-ide yang datang dari masa lalu tetapi masih ada sampai sekarang dan tidak dihancurkan. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan sejati atau warisan masa lampau. Masyarakat Tradisional tidak memiliki peran khusus seperti pada masyarakat kejawen, ketua adat yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis, maupun religius (Saleh dan Munif, 2015: 312).

Kejawen adalah perpaduan agama lain, telah menjadi sebuah tradisi serta menyatu menjadi sebuah kepercayaan baru bagi masyarakat Jawa atau masyarakat hidup di sekitar pulau jawa (Safrida, 2017 hal 2). Sementara itu, Rumawati (2011: 3) berpendapat bahwa Kejawen merupakan manifestasi budaya Jawa yang tetap terjaga kelestariannya hingga saat ini.

3. Nilai Demokrasi

“Nilai (value) adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis dimasukkan oleh manusia.” (Zamroni, 2014 hal 34). “Nilai demokrasi adalah sikap toleransi, menghargai pendapat orang lain, pemahaman serta pengakuan terhadap keragaman lingkungan, pengendalian diri yang tidak mencolok, persatuan, kemandirian dan kepatuhan terhadap aturan.” (Zuriah, 2014. hal 45). Pendapat lain, Arif (2012: 7) berpendapat bahwa nilai demokrasi adalah etos yang mengacu bukan hanya kepentingan individu, namun pada kehidupan sehari-hari keluarga, sekolah dan masyarakat.

A. Indikator-indikator nilai demokrasi

Menurut Hendri B Mayo (2012), mengemukakan nilai dalam demokrasi, yaitu :

1. Menyelesaikan persoalan dan perubahan kondisi secara damai dan ter lembaga. Ada kalanya dalam kehidupan

sehari-hari kita menghadapi masalah yang membuat perubahan-perubahan baik yang dapat diselesaikan sendiri atau pun masalah besar yang harus di selesaikan bersama. Indonesia yang merupakan negara Demokrasi yang mempunyai lembaga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat agar tercipta masyarakat yang damai.

2. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Setelah beberapa kali pergantian sistem pemerintahan, Indonesia akhirnya menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Presiden dalam mengatur jalannya pemerintahan dan negara dengan dibantu oleh para menteri yang dipilih dan dilantik oleh Presiden. Presiden mempunyai masa kepemimpinan di mana tertulis dalam UUD 1945 pasal 7 yang berbunyi “Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.”

3. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity). Keanekaragaman di Indonesia merupakan hal yang lumrah dan harus diakui oleh semua rakyatnya karena Indonesia mempunyai semboyan negara yaitu “Bhineka Tunggal Ika” yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat yang paham nilai demokrasi tentunya paham bahwa setiap individu yang ada di Indonesia adalah bagian dari Indonesia dan kita patut menghargai semuanya selagi kita ingin dihargai.

4. Menjamin tegaknya keadilan. “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan bunyi dari sila ke-5 Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Semua masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama tidak ada hak istimewa yang diberikan negara kepada seseorang maka dari itu keadilan terwujud kecuali hak tersebut dilanggar karena warga negara tersebut melanggar suatu ketentuan. Hak-hak

tersebut ter tuang dalam UUD 1945 pasal 26-34.

4. Paguyuban

Paguyuban merupakan ketika kita hidup bersama dengan hubungan yang kita miliki, dimana hubungan ini kekal dan secara alamiah murni terbentuk dengan sendirinya (Ferdinand Tonnies pada Soerjono Soekanto, 2009: 116). Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Sebagai contoh adalah keluarga, keluarga besar, rukun tetangga, dan lainnya.

Paguyuban memiliki suatu kemauan bersama, ada suatu pengertian juga kaidah-kaidah yang timbul dengan sendirinya dari kelompok itu.

Tipe-tipe paguyuban menurut Ferdinand Tonnies (pada Soerjono Soekanto, 2009 : 116) diantaranya adalah:

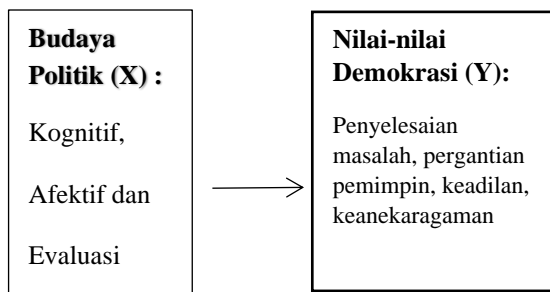
Pertama, paguyuban yang hadir karena adanya ikatan darah (*gemmeinschaft by blood*). Paguyuban ini mendasarkan pada

kesinambungan garis keturunan yang terus di wariskan dari generasi sebelumnya.

Kedua, paguyuban yang muncul berdasarkan tempat asal (*gemmeinschaft by place*). Paguyuban ini hadir sebagai bentuk ikatan atas daerah/tempat asal orang saling berkumpul. Karena ada ikatan tempat tinggal/asal, maka mereka membentuk paguyuban agar bisa saling tolong menolong.

Ketiga, paguyuban karena adanya ikatan jiwa/pikiran (*gemmeinschaft of mind*). Paguyuban ini muncul karena beberapa orang memiliki kesamaan ide/pikiran perihal sesuatu sehingga mereka bisa bertukar pikiran dan saling mendukung sebuah tujuan spesifik yang mereka yakini (ideologi).

5. Model Hubungan Antar Variabel



Penelitian ini memiliki 2 variabel yaitu variabel bebas (X) dan juga variabel terikat (Y).

1. Variabel Bebas atau independent variabel

“Variabel bebas adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel lain.” (Ibnu, Mukhadis dan Dasna pada Kusumastuti, Khoirun dan Achmadi. 2020: 17)

2. Variabel Terikat atau dependent variable merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent atau disebut juga sebagai variabel respons atau output.

6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Ada pengaruh Budaya Politik Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah terhadap nilai-nilai demokrasi.

H2 : Tidak ada pengaruh Budaya Politik Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah terhadap nilai-nilai demokrasi.

7 Definisi Konsep

A. Budaya Politik

“Budaya Politik adalah penerapan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik.” (Almond dan Verba, 2015: 3). Dikarenakan adanya sebab-sebab tersebut menjadikan suatu masyarakat memiliki ciri khas yang membedakan dengan yang lainnya. Budaya Politik dibagi menjadi 3 orientasi yaitu kognitif, afektif dan evaluasi.

B. Nilai Demokrasi

Nilai demokrasi adalah etika yang tidak hanya dikaitkan dengan kepentingan individu, tetapi juga menyangkut kehidupan sehari-hari dalam keluarga maupun di sekolah dan di masyarakat (Arif, 2012:7). Nilai-nilai demokrasi ini ada beberapa indikator

yaitu, penyelesaian masalah, pergantian pemimpin, keadilan, keanekaragaman.

8. Definisi Operasional

Operasionalisasi konsep merupakan suatu konsep abstrak yang menjadi konsep yang dapat diamati dan diukur. “salah satu faktor yang membantu komunikasi di antara peneliti adalah Operasionalisasi konsep yang mewakili tentang bagaimana variabel diukur.” (Iksan, 2014: 35)

Adapun pengukuran dari masing-masing variabel dalam penelitian ini, yakni

Tabel 1. 1 Variabel dan Indikator

Variabel Penelitian	Indikator
(X) Budaya Politik	Kognitif, Afektif, Evaluasi
(Y) Nilai-nilai Demokrasi	Penyelesaian masalah, perubahan secara damai, pergantian pemimpin, keadilan,

	keanekaragaman.
--	-----------------

sedangkan 1 responden atau 1% menyatakan setuju dengan hal tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Masih Kuatnya Budaya Politik

Parokial

Budaya politik dalam penelitian ini diukur dengan indikator budaya politik Parokial yang memudar tapi tidak hilang dan juga indikator dari budaya politik subjek dan partisipan yang mulai mengemuka walaupun hanya sedikit. Uraian berikut menjelaskan tentang mengokohkan budaya politik Parokial.

a. Kepercayaan terhadap Sistem

Kekerabatan dan Kepala Paguyuban

Dari hasil survei yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa paguyuban yang dibentuk untuk mewartakan komunitas yang diteliti masih berdasarkan sistem kekerabatan. 99% memilih sangat setuju atau 98 responden menyatakan bahwa sangat setuju jika Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah berdasarkan hubungan kekerabatan,

Dari data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden sangat setuju jika Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah menggunakan sistem kekerabatan dikarenakan mereka memang masih menggunakan sistem kekerabatan dalam hal melakukan pemilihan. Mereka yang tertua dalam keluarga bukan berdasarkan umur namun berdasarkan garis keturunan lah yang memimpin atau menjadi Bedogol.

Di sisi lain, saat ditanyakan pertanyaan, “Apakah Saudara mempercayai dan meyakini kepemimpinan kepala paguyuban? maka hasil jawaban bisa dipublikasikan. Responden dengan jawaban paling banyak adalah 96,9% responden sangat setuju, disusul 3% responden memilih setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden menjawab paling banyak (96,9%) sangat setuju dikarenakan

mereka percaya dan yakin dengan kepala paguyuban atau Bedogol ini.

Selanjutnya, responden juga merespon semua arahan berasal dari kepala paguyuban yang di tunjukkan

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	0	0%
2.	Setuju	5	5,2%
3.	Kurang Setuju	87	90,6%
4.	Tidak Setuju	3	3,1%
5.	Sangat Tidak Setuju	1	1%
	Total	96	100%

dengan tabel 1 berikut.

Tabel 1 dapat kita ketahui bahwa semua arahan berasal dari kepala paguyuban direspon oleh responden dengan jawaban paling banyak adalah 90,6% responden kurang setuju, disusul 5,2% responden memilih setuju, disusul 3,1% menyatakan tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju. Kurang setuju dipilih sebanyak 90,6% atau sebanyak 87 orang dikarenakan mereka berpendapat bahwa arahan bukan hanya berasal dari kepala paguyuban namun dari pihak lain seperti perangkat desa dan lainnya. 5 orang yang memilih setuju dikarenakan menurut mereka, arahan berasal dari kepala paguyuban dan 1 orang yang tidak setuju dikarenakan beliau mengatakan bahwa arahan bukan hanya dari kepala paguyuban namun bisa dari diri sendiri.

Selanjutnya, penulis ingin menanyakan banyaknya responden yang mengikuti arahan dari kepala paguyuban. Hal tersebut direspon

langsung oleh responden dengan frekuensi berbeda-beda sesuai jawaban yang sudah di olah berikut pada tabel 2.

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	1	1%
2.	Setuju	77	80,2%
3.	Kurang Setuju	14	14,6%
4.	Tidak Setuju	4	4,2%
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0%
	Total	96	100%

Tabel 2 di atas dapat kita ketahui bahwa responden mengikuti semua arahan kepala paguyuban direspon oleh responden dengan jawaban paling banyak adalah 80,2% responden setuju dikarenakan mereka masih mengikuti

semua arahan yang diberikan Bedogol, disusul 14,6% responden memilih kurang setuju, mereka yang memilih kurang setuju dikarenakan tidak semua hal mereka ikuti ada beberapa yang menurut mereka kurang pas tidak akan mereka ikuti, 4,2% menyatakan tidak setuju, mereka berpendapat bahwa semua arahan dari Bedogol tidak harus diikuti kita juga perlu memilah dan 1% sangat setuju. Hal ini penunjukan bahwa responden menjawab paling banyak (78%) setuju jika saya mengikuti semua arahan kepala paguyuban.

b. Keteguhan Memegang Agama, Tradisi, dan Adat Warisan Leluhur

Agama adalah hukum, yaitu hukum yang mengatur keadaan manusia dan mengenai sesuatu yang supranatural, moral dan kehidupan sosial (Ismail, 1997: 28). Agama dengan kata lain adalah sebuah pedoman dalam menjalani kehidupan. Kehidupan

masyarakat kejawan terus-menerus mengikuti leluhur atau dengan kata lain menjalani kehidupan dengan mengikuti warisan yang diturunkan leluhur. Di bawah ini indikator-indikator terkait agama, tradisi dan adat warisan leluhur.

Masyarakat kejawan masih menjaga tradisi karena merupakan hal turun - temurun dari nenek moyang direspon oleh responden dengan jawaban paling banyak adalah 97,9% responden sangat setuju, disusul 2,1% responden memilih setuju dikarenakan mereka selalu menceritakan dan menjaga tradisi yang dari zaman leluhur memang ada dan selalu melakukan tradisi sesuai dengan aturan yang sudah ada dari zaman leluhur.

Pada gambar 1 di bawah ini adalah contoh salah satu tradisi turun-temurun dari nenek moyang, ini adalah acara selamatan sebagai wujud syukur atas nikmat yang telah diberikan dari Allah. Masyarakat kejawan akan melakukan tradisi selamatan untuk hal

yang telah mereka capai, atau hal baru yang mereka dapatkan.



Gambar tersebut adalah selamatan pada saat peresmian gapura selamat datang di desa adat Adiraja.

Selain itu, penulis juga ingin meneliti apakah responden mengikuti kegiatan adat-istiadat yang masih ada. Setelah di lakukan survei diketahui responden mengikuti semua kegiatan yang berhubungan dengan acara adat - istiadat direspon oleh responden dengan jawaban paling banyak adalah 97,9% responden sangat setuju, mereka berpendapat bahwa mereka mengikuti semua kegiatan dari awal hingga akhir dan dengan aturan yang berlaku. Disusul 2,1% responden memilih setuju serta 1% kurang setuju.

Selanjutnya, untuk mengetahui berapa banyak responden yang masih mempercayai agama yang ada di dalam masyarakat Kejawen. Apakah masih menggunakan agama yang diturunkan leluhur, penulis mendapatkan respons sesuai adalah 97,9% responden memilih sangat setuju, disusul 2,1% responden memilih setuju. Menurut salah satu responden “agama saya menjalankan puasa sebagaimana orang islam, mempunyai Tuhan yang disebut Gusti Allah namun saya belum melaksanakan salat.”

Selain itu, pakaian adalah suatu hal yang menjadi identitas dari sebuah paguyuban atau komunitas. Untuk mengetahui ketaatan dalam menggunakan pakaian adat penulis menghasilkan data 65,6% responden sangat setuju, disusul 30,2% responden memilih setuju dan 4,2% kurang setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden menjawab paling banyak (65%) sangat setuju bahwasanya mereka masih

mengenakan pakaian adat ketika ada upacara keagamaan. Sebagai contoh adalah saat upacara peresmian Gapura Pasemuan, semua warga masyarakat masih menggunakan baju adat jawa dan ikat kepala sebagai bentuk identitas mereka. Responden yang memilih kurang setuju dan setuju dikarenakan mereka tidak memakai ikat kepala seperti yang ditanyakan pada kuisisioner. Dibawah ini adalah contoh pakaian adat yang dikenakan oleh Paguyuban Resik Kubur Jero tengah.



Menurut Almond dan Verba (1965: 3) berpendapat bahwa Budaya Politik adalah penerapan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Setelah

mengetahui hasil survei yang sudah dijelaskan dalam beberapa tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Budaya politik Parokial di Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah masih ada, hal ini dibuktikan dengan paguyuban masih menggunakan sistem kekerabatan, memiliki kepala paguyuban yang diyakini dan dipercayai, adanya tradisi yang diturunkan oleh para leluhur dan dipercayai, meyakini terhadap agama yang telah ada, masih menggunakan atribut Jawa untuk acara keagamaan. Budaya politik subjek dan partisipasi ada. Kemunculan namun masih kecil yaitu tentang arahan yang diberikan kepala paguyuban kepada kepala paguyuban mereka banyak memilih kurang setuju pada pertanyaan ini. Kesimpulan yang dapat kita ketahui adalah budaya Parokial masih ada dalam paguyuban Resik Kubur Jero Tengah ini, dikarenakan faktor kognitif yaitu kepercayaan dan keyakinan yang masih

dipegang teguh oleh masyarakat tersebut.

B. Budaya Politik Parokial Masih Mendukung terhadap Nilai Demokrasi

Budaya politik Parokial yang sudah berkembang pada penjelasan sebelumnya selanjutnya diuji dengan nilai demokrasi yang ada di masyarakat paguyuban Resik Kubur Jero Tengah dengan beberapa indikator yaitu tentang kepemimpinan; penyelesaian masalah; dan kebangsaan, tentang pemilihan umum serta tentang penerimaan terhadap pemerintahan yang sah. Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga indikator.

a. Tentang Kepemimpinan, Penyelesaian Masalah, dan Kebangsaan

Untuk mengetahui tentang penyelesaian masalah, penulis memberikan pertanyaan kepada responden “apakah dalam kehidupan sehari-hari semua masalah diselesaikan

oleh kepala paguyuban?" dan ditunjukkan dengan tabel 3 berikut.

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Setuju	1	1
2.	Setuju	70	72,9
3.	Kurang Setuju	21	21,9
4.	Tidak Setuju	4	4,2
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Total	96	100

Berdasarkan data menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari - hari semua masalah diselesaikan oleh kepala paguyuban direspon oleh responden dengan jawaban paling banyak adalah

72,9% responden setuju, disusul 21,9% responden memilih kurang setuju, disusul 4,2% responden memilih tidak setuju dan 1% sangat setuju.

Responden yang memilih kurang setuju dikarenakan menurut mereka tidak semua masalah diselesaikan oleh kepala paguyuban ada beberapa masalah yang dapat diselesaikan sendiri misal masalah pribadi ataupun masalah rumah tangga.

Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana sistem pemilihan kepala paguyuban apakah masih menggunakan sistem yang lama yaitu dengan sistem keturunan. Penulis memberikan pertanyaan terkait hal tersebut dan dijelaskan 96,9% responden sangat setuju dan disusul 3,1% responden memilih

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden menjawab paling banyak sangat setuju jika kepala paguyuban dipilih berdasarkan keturunan. Keturunan tertua akan menjadi kepala

paguyuban, bukan karena umur namun karena garis keturunan. Lebih detail dikatakan oleh salah satu responden “kepala paguyuban yang ada sekarang 7 kepala dan setiap kepala mewakili tiap keluarga besar, mereka di pilih bukan berdasarkan usia namun berdasarkan garis keturunan. Sebagai contoh saya berumur 45 tahun tapi saya masih punya paman berumur 35 tahun, karena paman saya lebih tua jika garis keturunan maka beliau yang lebih berhak menjadi kepala.”

Selain itu, keanekaragaman di dalam bangsa Indonesia menjadikan penulis ingin mengetahui bagaimana tanggapan mereka terhadap keanekaragaman yang ada. saya mempercayai adanya keanekaragaman di dalam bangsa Indonesia direspon oleh responden dengan jawaban paling banyak adalah 97,9% responden sangat setuju dan disusul 2,1% responden memilih setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden menjawab paling

banyak (98%) sangat setuju mempercayai adanya keanekaragaman di dalam bangsa Indonesia. Mereka menjalani keanekaragaman langsung yang ada di lingkup sekitar mereka yaitu dengan adanya 5 agama di desa tersebut dan terbukti mereka dapat saling menjaga satu sama lain dan menjalani kehidupan bersama.

b. Tentang Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sebuah sarana untuk kita menunjukkan hak kita sebagai warga negara Indonesia dengan memberikan dukungan kepada salah satu calon dari pemimpin yang ada. Pada subbab ini akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana paguyuban Resik Kubur Jero Tengah menanggapi terkait dengan hak mereka sebagai warga negara. Penulis memberikan pertanyaan terkait dengan pemilu merupakan hak setiap warga negara dan direspon sebagai berikut. 99% responden sangat setuju dan disusul 1% responden memilih setuju. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat

paguyuban Resik Kubur Jero Tengah sangat setuju terkait dengan pemilihan umum sebagai hak warga negara Indonesia.

Selain itu, penulis juga bertanya terkait keikutsertaan responden terhadap pemilihan umum baik dari lingkup desa atau pun pemilihan umum kepala daerah. Responden mengikuti semua pemilihan umum baik dari lingkup Pilkades atau pun Pilkada direspon oleh responden dengan jawaban paling banyak adalah 99% responden sangat setuju dan disusul 1% responden memilih setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden menjawab paling banyak (99%) sangat setuju, responden mengikuti semua pemilihan umum baik dari pemilihan kepala desa dan juga kepala daerah. Mereka memilih sesuai dengan pilihan mereka sendiri, bahkan beberapa calon kepala daerah datang ke paguyuban tersebut untuk sekadar menanyakan apa keinginan dari para masyarakat untuk periode berikutnya.

c. Tentang Penerimaan pada Pemerintah yang Sah

Untuk mengetahui sejauh mana peran paguyuban Resik Kubur Jero Tengah terhadap pemerintah. Penulis memberikan pertanyaan terkait hal tersebut, “Apakah anda setuju dengan keputusan-keputusan yang dibuat pemerintah?” 97,9% responden sangat setuju dan disusul 2,1% responden memilih setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden menjawab paling banyak sangat setuju jadi responden setuju dengan keputusan - keputusan yang dibuat Pemerintah. Salah satu juga menjelaskan tentang keputusan yang dibuat pemerintah tentang kepercayaan dan mereka sangat senang karena kepercayaan mulai mengemuka.

Selain itu, untuk mengetahui pemerintah memberikan keadilan sesuai dengan paguyuban Resik Kubur Jero Tengah maka penulis menanyakan hal tersebut. Berdasarkan data menunjukkan bahwa menurut responden pemerintah

adil dalam memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia direspon oleh responden dengan jawaban paling banyak adalah 96,9% responden sangat setuju dan disusul 3,1% responden memilih setuju. Responden yang memilih sangat setuju berpendapat bahwa pemerintah sekarang ini atau pemerintah pak Jokowi mereka merasa adil dan pemerintahannya sangat bijak dan banyak hal yang dipermudah.

Dalam lain hal, penulis ingin mengetahui keikutsertaan responden pada kegiatan yang ada di desa dan di adakan oleh desa mereka sendiri. 99% responden sangat setuju dan disusul 1% responden memilih setuju. Mereka mengikuti kegiatan yang ada di seperti musrenbang yang merupakan bagian dari pemberian aspirasi masyarakat.

Selanjutnya, musyawarah adalah hasil dari diskusi yang sangat baik dalam menyatukan pikiran masyarakat dan sarana untuk memberikan aspirasi langsung masyarakat. Penulis

memberikan hasil dari survei terhadap masyarakat kejawan paguyuban Resik Kubur Jero Tengah tentang keikutsertaan mereka dalam musyawarah desa untuk memberikan aspirasinya. Responden dengan jawaban paling banyak adalah 95,8% responden sangat setuju, disusul 3,1% responden memilih setuju dan 1% memilih kurang setuju. Masyarakat sangat senang jika ada musyawarah desa karena hal ini berguna untuk memberikan aspirasi baik itu yang membangun atau pun yang menginginkan kebaikan.

Nilai demokrasi adalah pandangan hidup yang mengacu tidak hanya pada kepentingan individu, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari keluarga, sekolah dan masyarakat (Arif, 2012 : 7). Jika kita telaah beberapa indikator dapat disimpulkan bahwa budaya politik masyarakat kejawan paguyuban Resik Kubur Jero Tengah mendukung terhadap nilai demokrasi. Nilai demokrasi adalah pandangan hidup

berkaitan dengan masyarakat, masyarakat paguyuban Resik Kubur Jero Tengah jelas mendukung terhadap nilai demokrasi. Sebagai bukti hal tersebut adalah, semua masalah tidak di selesaikan oleh kepala adat, mereka mempercayai adanya keanekaragaman dalam bangsa Indonesia, mereka menggunakan hak mereka dalam memilih kepala daerah atau pun kepala desa, mereka setuju dengan keputusan dan kebijakan yang di buat, mereka mengikuti kegiatan yang ada di desa mereka bukan hanya kegiatan yang mereka buat, dan mereka mengikut musyawarah desa untuk memberikan aspirasi mereka.

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil pembahasan, bisa disimpulkan bahwa Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah bisa dikategorikan masih memegang kuat budaya politik Parokial. Hal ini dibuktikan dengan masih kuatnya sistem kekerabatan dan

pola kepemimpinan, serta kepercayaan mereka terhadap agama, tradisi dan adat istiadat yang di wariskan dari nenek moyangnya. Meski pun demikian, supaya politik parokial ini tidak serta merta menjadi anti-tesis dari nilai-nilai demokratis sebagaimana cara pandang Almond dan Verba yang memandang budaya parokial adalah bentuk budaya politik paling kuno (tidak modern) yang cenderung kurang demokratis.

Dari hasil survei penulis, Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah mampu beradaptasi dan mendukung dengan nilai-nilai demokratis yang ada. Mereka tetap bisa menjadi partisipan yang aktif, baik dalam penyelesaian masalah publik, pemilihan umum, hingga terhadap kebijakan pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tidak mesti menjadi lawan dari demokrasi. Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah terbukti mampu mengintegrasikan

budaya parokialnya agar tetap *support* terhadap nilai-nilai demokrasi.

Hasil hipotesa dalam penelitian ini adalah ada pengaruh Budaya Politik Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah terhadap nilai demokrasi yaitu berwujud sebagai dukungan.

B. Saran

Dari penelitian ini, penulis memperlihatkan bahwa tidak selalu tradisi bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Dari pemahaman tersebut, maka ada cukup ruang elaborasi lain yang bisa diselidiki dalam penelitian selanjutnya. Seperti, bagaimana pola kepemimpinan tradisional bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat secara lebih efektif? Bagaimana institusi-institusi formal bisa menempatkan institusi tradisional tanpa melakukan diskriminasi? Beberapa potensi riset di atas bisa menjadi peluang untuk penelitian selanjutnya.

Daftar pustaka

A. Buku

- Almond dan Verba. 1965. Budaya Politik , Tingkah Laku, Politik, dan Demokrasi di Lima Negara (Cet 3 , Jakarta: Bumi Aksara 2005)
- Arif. 2012. Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arriyono dan Siregar.1985. Kamus Antropologi. Jakarta: Akademik Pressindo
- BPS Kabupaten Cilacap. 2019. Kecamatan Adipala Dalam Angka. Cilacap: BPS Kabupaten Cilacap
- Faisal Ismail.1997. Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis. Yogyakarta : Titian Ilahi Press.
- Gaffar. 2004. Politik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ismail. 2018. Statistika untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kantraprawira. 2006. Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusumastuti, Khoirun dan Achmadi. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta : Deepublish.
- Rohaniah dan Efriza. 2017. Handbook Sistem Politik Indonesia. Malang : Intrans Publising.
- Saleh. 2004 . Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Kencana.
- Soekanto. 1983. Kamus Sosiologi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suparyanto. 2018. Demokrasi Di Indonesia. Klaten : Cempaka Putih.
- Torres. Dalam Soekanto. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Zamroni. 2014. Pendidikan Pancasila. Bandung: Alfabeta.
- Zuriah. 2014. Nilai-Nilai Karakter Bangsa. Jakarta: Kencana.

B. Artikel dalam Jurnal, Majalah dan Surat Kabar

Laporan Kejaksaan Negeri Cilacap

Safrida. (2017). Bentuk dan Proses Ritual Komunitas Islam Kejawen di

Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung. Jurnal Pendidikan Sosiologi. UNY.

Saleh dan Munif. (2015). Membangun Karakter Budaya Politik dalam Berdemokrasi. Addin.

Davies dan Lewis. 1971, dalam Riyanto. Budaya Politik Indonesia.(UPI Bandung 2006)

C. Makalah, Skripsi, Tesis, atau Disertasi

Hair, Anderson, Tatham, dan Black. 1995 . dalam Kiswati, Sri. 2010, Studi tentang sikap konsumen atas merek Tolak Angin pada mahasiswa FE Undip Semarang. Tesis dipublikasikan Program studi Magister manajemen program paska sarjana, Universitas Diponegoro Semarang

Iksan. 2014. Pengaruh Perilaku Pemilih terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Wali kota Kota Pagaralam Putaran Kedua. *Skripsi*. Universitas Bengkulu.

Rumawati. (2011). Keberadaan Aliran Kejawan SAPTA DARMA (Studi Kasus di Persatuan Warga Sapta Darma Kabupaten Kendal). Fakultas Ilmu Sosial. UNNES.